

# **IMPLEMENTASI SISTEM PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN MELALUI PROGRAM PENEMPATAN TENGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH Di DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRASNSMIGRASI KABUPATEN MADIUN**

**Rizal Asidiqi**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA e-mail: [asidiqi.rizal@gmail.com](mailto:asidiqi.rizal@gmail.com)

**Hj. Weni Rosdiana, S.Sos.,M.AP**

D3 Ilmu Administrasi Negara, FISH, Unesa e-mail: [wenirosdiana@unesa.ac.id](mailto:wenirosdiana@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Salah satu alternatif mengurangi pengangguran di Kabupaten Madiun, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat suatu program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah ini bertujuan untuk menempatkan pencari kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta menjalin hubungan industrial yang baik. Sasaran dari program ini adalah siswa-siswi SMA-SMK kelas 12 di Kabupaten Madiun dan pencari kerja yang datang ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah ini seperti memberikan informasi pasar kerja, melakukan bimbingan jabatan, dan memberikan pelatihan kepada pencari kerja. Setelah diimplementasikan masih terdapat pengangguran sebesar 6,99% pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui dan menganalisis implelemelemtasi Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan adalah variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian sosialisasi yang diberikan tidak kepada semua SMA dan SMK di Kabupaten Madiun karena jumlah staf yang kurang memadai dan jangkauan yang luas. Dalam sosialisasi penyampaian materi yang diberikan kepada pencari kerja dapat di mengerti dengan baik walaupun masih ada beberapa yang belum mengerti bisa bertanya kepa pengatar kerja (staf). Untuk konsistensi materi ini sudah cukup konsisten. Sedangkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kejra Antar Daerah masih kurang karena hanya memiliki empat orang staf di bidang ketenagakerjaan. Informasi yang didapat oleh para pelaksana program sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah ini, wewenang berada pada bidang Penempatan, Pelatihan dan produktivitas pada seksi penempatan dan perluasan kerja. Alat pelatihan yang ada masih kurang dan tidak dapat memberikan pelatihan kepada semua pencari kerja yang belum memiliki keterampilan. Untuk aspek disposisi, sikap para pelaksana program sudah cukup baik, tetapi para pelaksana program ini tidak di berikan tambahan insentif. Pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah sudah sesuai dengan SOP. Saran peneliti yaitu jumlah staf seharusnya ditambahkan lagi, menggunakan mobil keliling informasi kerja agar lebih luas dalam memberikan informasi, seharusnya bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak lain dalam memberikan pelatihan kerja, penambahan alat pelatihan kerja seharusnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan memberikan pelatihan wirausaha baru kepada penacari kerja yang tidak lolos seleksi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penempatan, Kerja.

## **Abstract**

In order to decrease unemployment in Madiun District, Social Service, Labouring, and Transmigration Bureau of Madiun creates Labour Placement Programme of Cross-Jobs and Cross-Regions. This programme is aimed to place job seekers based on their abilities and skills as well as to build better industrial relations. Targets of this programme are twelfth-grade students in Madiun district and job seekers who come to the Social Service, Labouring, and Transmigration Bureau. Through this programme are given information about job markets, job guidance, and job trainings to job seekers. After its implementation, however, there is 6.99% of unemployment in 2015. Based on the background above, this study aims to find out and analyse the implementation of Employment Organisation System through Labour Placement Programme of Cross-Jobs and Cross-Regions in Madiun District.

The type of this study is a descriptive study with qualitative approach. Furthermore, this study focuses on variables such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The data for this study is collected through observations, interviews, and documentations.

The result of this study shows that the socialization is not given to all high schools in Madiun district due to lack of staffs and wide range to be reached. Nevertheless, materials given in socialisations can be understood well enough although there are some participants who still do not understand that they end up asking the staffs. The materials are consistent, whereas the number of human resources used in the implementation is not sufficient. In the implementation, there are only four staffs in employment sector. In the implementation of this programme, the authority is on Placement, Training, and Productivity Sector of work placement and expansion. Devices used for trainings are not sufficient and unable to provide trainings for all job seekers who lack of skills. In terms of disposition, the attitudes of the programme committee are good enough. However, they do not receive additional incentive. The implementation of the programme itself is already based on the standard operating procedure. The writer suggests that the programme committee would better add more staffs and use a patrol car to spread information about jobs and vacancies. It would also be better for them to cooperate with private institutions in providing job trainings and adding devices for job trainings which meet the job markets' needs. Additionally, they can also provide trainings on entrepreneurship for job seekers who do not pass through job selections.

**Key words:** Implementation, Labour ,Placement

## PENDAHULUAN

Pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia memang masalah yang perlu disikapi secara serius. Bahkan Wakil Presiden Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trost senbrug juga mengungkapkan bahwa pengangguran usia muda yang tinggi, kesenjangan yang meluas dan keterbatasan keterampilan menjadi masalah yang mendasar. Pada tahun 2016 dari jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas Indonesia pada tahun 2016, ada sebanyak 187,60 juta orang yang bekerja dan sisanya 59,93 juta orang menganggur. Penduduk Jawa Timur yang berusia kerja mulai 15 tahun keatas adalah 30,02 juta orang pada tahun 2016. Dari jumlah angkatan kerja tersebut penduduk yang bekerja mencapai 19,65 juta orang, selebihnya 10,37 juta orang menganggur. ([www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id))

Berdasarkan data BPS pengangguran di Kabupaten Madiun mulai dari tahun 2011-2015:

Tabel 1.1

Prosentase pengangguran terbuka Kabupaten Madiun

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Prosentase	4,96%	3,99%	4,63%	3,38%	6,99%

Sumber: BPS Jatim 2016

Berdasarkan data BPS tahun 2016 pengangguran di Kabupaten Madiun masih tergolong tinggi pada tahun 2015 sebesar 6,99%. Setiap tahun jumlah pengangguran di Kabupaten Madiun jumlahnya fluktuatif sehingga setiap tahun pasti mengalami penurunan dan kenaikan. Dalam mengurangi pengangguran ini Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja AKAD.

Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di laksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun pada tahun 2013.

Program tersebut diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Madiun no 39 tahun 2012. Tujuan dari program tersebut yaitu untuk mengurangi pengangguran, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan menjalin hubungan industrial yang baik.

*Target Group* atau kelompok sasaran dari program penempatan tenaga kerja antar daerah adalah pengangguran di Kabupaten Madiun yang datang ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan para siswa-siswi SMA-SMK kelas 12 di Kabupaten Madiun.

Berdasarkan data pengangguran di atas dengan masih adanya pengangguran yang meningkat pada tahun 2015. Pengimplementasian pada program penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah di Kabupaten Madiun ini maka dalam penelitian ini menggunakan teori dengan model implementasi kebijakan menurut Gerge Edward III dengan empat variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

Dari fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas sosial, Tenaga Kerja Kabupaten Madiun”**. Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan melalui program penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah di Dinas, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan melalui program penempatan tenaga kerja antar kerja

antar daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian mengambil di Dinas, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Purposive Sampling adalah strategi menentukan informan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan relevan dalam memberikan informasi mengenai masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi purposive sampling yaitu:

1. Bapak Edy Sudarko selaku Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas.
2. Bapak Puguh selaku Kepala seksi Penempatan, dan pelatihan.
3. Ibu Linda Sari selaku staf atau perantara kerja
4. Ibu Ika Kurnia Sari selaku staf atau perantara kerja.
5. Ibu Sendy selaku staf atau perantara kerja.
6. Bapak Amir Komarudin selaku staf atau perantara kerja.
7. Pencari kerja yang sudah berhasil ditempatkan dan pencari kerja yang datang ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Fokus dari penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan Gerge Edward III yang menilai keberhasilan suatu kebijakan dengan empat variabel Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer  
Dalam penelitian implementasi sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan melalui program penempatan tenaga kerja antar daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun ini, data primer dari wawancara kepada beberapa informan penelitian di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.
2. Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, data-data statistik, sumber data tertulis, laporan yang akan menunjang, dan memperkuat data utama untuk dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

1. **Gambaran umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.**

Seiring dengan pentingnya pekerjaan bagi masyarakat, untuk menumbuhkan bakat dan keterampilan yang dimiliki, untuk mengikuti program yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun dalam mengurangi pengangguran dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Madiun. Dengan demikian Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun mengajak masyarakat untuk ikut dalam penempatan tenaga kerja yang diambilkan dari dana APBD. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga sumber daya manusia agar dapat mempertahankan kompetensi yang dimiliki sekaligus dapat mengoptimalkan manfaatnya, untuk memperoleh hasil demi kelangsungan hidupnya.

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **2. Deskripsi Program Penempatan Tenaga kerja Atar Kerja Antar daerah**

Dalam Pengimplementasian suatu kebijakan tidak terlepas dari peran unsur-unsur kebijakan sebagai aktor utama dalam menunjang keberhasilan program. Program Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah unsur pelaksana dari program tersebut adalah Dinas,

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Unsur Implementasi yang kedua adalah kebijakan atau program. Program yang berisikan isi kebijakan, tujuan kebijakan dan sasaran program yang jelas dan mudah untuk dimengerti selanjutnya dilaksanakan oleh implementor kebijakan. Peneliti mengambil program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah adalah program yang diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak-hak dan perlindungan hukum.

Unsur Implementasi yang ketiga adalah kelompok sasaran. Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang di dalam masyarakat yang menerima program tersebut. Dalam Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah untuk kelompok sasarannya yaitu pencari kerja yang ada di Kabupaten Madiun dan Siswa-Siswi SMK di Kabupaten Madiun. Karena Siswa-Siswi SMK yang belum memiliki pengetahuan sebelum terjun ke dunia kerja akan di beri bekal mengenai dunia kerja.

### **3. Implementasi Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah**

Dalam penelitian implementasi sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan melalui program penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah memfokuskan penelitian dengan menggunakan teori dari Gerge C. Edward III dengan menggunakan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan empat variabel dari teori Gerge C. Edward III tersebut maka peneliti akan mengulas satu persatu untuk menjabarkan implementasi Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun. Adapun penjabaran Implementasi Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah adalah sebagai berikut:

#### **1) Variabel Komunikasi**

##### **a. Transmisi**

Dalam transmisi implementasi program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun yaitu kurang pemahannya dari

pencari kerja mengenai program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah, hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan pencari kerja yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya pencari kerja bisa bertanya kepada pengantar kerja apa bila dalam seminar yang diberikan belum dimengerti sehingga lebih mudah memahami program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Pelaksanaan seminar ini hanya dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekolah-Sekolah yang ada di Kabupaten Madiun. Sehingga masyarakat umum yang tidak datang ke Dinas tidak akan mengetahui adanya program tersebut.

##### **b. Kejelasan**

Kejelasan yang diberikan pada saat sosialisasi masih ada pencari kerja yang belum mengerti, karena yang mengikuti sosialisasi tersebut tidak hanya satu orang dan berbeda-beda pendidikannya maka apa bila ada yang kurang mengerti bisa bertanya kepada pengantar kerja. Sebelum memberikan informasi kepada pencari kerja pengantar kerja diberikan pelatihan oleh Kepala Dinas yang bertujuan agar informasi yang diberikan kepada pencari kerja bisa lebih jelas.

##### **c. Konsistensi**

Konsistensi dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyampaikan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah kepada pencari kerja sudah cukup baik. Selain dengan sosialisasi pencari kerja bisa bertanya jawab dengan pengantar kerja yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun apa bila belum paham pada saat sosialisasi. Dengan cara itu dirasa lebih efektif dalam memberikan kejelasan materi kepada pencari kerja.

#### **2) Variabel Sumberdaya**

##### **a. Sumber Daya Staf**

Dalam pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah sumber daya staf dalam bidang ketenagakerjaan masih belum mencukupi karena hanya memiliki empat orang staf. Terbukti dalam pelayanan yang di berikan kepada pencari kerja terbilang lamban karena pencari kerja harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat tidak semuanya mengetahui karena staf tidak mampu menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Madiun.

##### **b. Informasi**

Informasi yang didapatkan oleh para pelaksan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah cukup baik. Selama pelatihan kepada

pengantar kerja diberikan materi terkait program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya pengantar kerja di bekali dengan kertas yang berisi tentang bakat, minat pencari kerja. Sehingga membantu pengantar kerja untuk menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan bakat minatnya.

Dengan adanya website dan leaflet diharapkan masyarakat lebih mudah untuk mengetahui informasi terkait Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Selain itu pelatihan kerja kepada pencari kerja juga dilakukan guna memberikan informasi terkait program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah dan memberikan pelatihan kerja kepada pencari selama tiga bulan untuk mempermudah penempatan tenaga kerja atau menempatkan pencari kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Dengan begitu diharapkan pencari kerja dapat memahami program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Tetapi tidak semua pencari kerja dapat mengikuti pelatihan kerja karena alat untuk pelatihan kerja yang terbatas.

#### **c. Kewenangan**

Implementasi program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun wewenang dalam pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah tersebut berada pada Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas.

Wewenang yang diberikan adalah memberikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja, membimbing pencari kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, memberi pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja, melakukan seleksi kepada pencari kerja. Serta memberikan pelatihan kerja kepada pencari kerja berupa pelatihan komputer dan pelatihan menjahit, materi yang diberikan selama pelatihan kerja berupa bagaimana cara mengoperasikan komputer dengan menjalankan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Selama Pelatihan menjahit pencari kerja diberikan materi bagaimana cara membuat baju dan celana. Selain itu proses Seleksi pencari kerja seleksi ini sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja dan langsung diberikan seleksi tes oleh perusahaan yang memberi pekerjaan. Dalam wewenang tersebut pengantar kerja sudah sesuai dengan posisinya masing-masing. Tetapi dalam melakukan seleksi kepada pencari kerja tidak semua dari pencari kerja diterima bekerja.

#### **d. Fasilitas**

Sehubungan dengan fasilitas yang ada dalam program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar

Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah cukup memadai dalam pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Tetapi untuk alat pelatihan kerja tidak cukup banyak yang dimiliki hanya mesin jahit dan komputer saja dengan jumlah yang terbatas hanya memiliki 10 mesin jahit dan 10 mesin komputer saja, sehingga tidak mampu mencukupi untuk memberi pelatihan kepada semua pencari kerja yang belum memiliki keterampilan kerja. Juga masih ada ruang tunggu untuk pencari kerja yang tidak nyaman karena berada di halaman depan dan tidak disediakan ruang tersendiri yang dilengkapi kipas angin atau ac.

### **3) Variabel Disposisi**

#### **a. Sikap**

Sikap dari pelaksana program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Madiun sudah terbilang baik. Dalam memberikan pelayanan kepada pencari kerja pelaksana program melakukannya dengan ramah, sopan, dan dari hati. Selain itu para pelaksana program mempunyai komitmen untuk melakukannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **b. Insentif**

Para pelaksana program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun, insentif yang diterima hanya gaji pegawai setiap bulan saja, tidak ada tambahan insentif bagi pelaksana program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Meski tidak ada penambahan insentif untuk pelaksana program, hal ini tidak membuat pelaksana program merasa malas karena pelaksana program sadar bahwa pengangguran masalah yang harus disikapi dengan serius.

### **4) Struktur Birokrasi**

Pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi masyarakat masih banyak yang tidak tahu mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua itu karena kurangnya sosialisasi mengenai Standar Operasional Prosedur kepada pencari kerja.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian Implementasi Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Madiun. Dengan menggunakan teori dari Gerge C. Edward III, maka dapat disimpulkan dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Pada variabel komunikasi, sosialisasi program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun sudah cukup baik. Terbukti dengan dilakukannya sosialisasi di sekolah-sekolah dan pencari kerja yang datang ke Dinas setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya tidak semua SMA dan SMK di Kabupaten Madiun di berikan sosialisasi. Dengan penyampain materi kepada pencari kerja dan diberikan sesi tanya jawab diharap bisa membantu pencari kerja dalam memahami isi dari materi yang di berikan. Dalam pelaksanaan sosialisasi masih ada pencari kerja yang belum mengerti dan apa bila belum mengerti bisa bertanya kepada pengantar kerja yang ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

Pada variabel sumber daya pelaksana program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah dirasa sumber daya staf yang kurang memadai karena hanya memiliki empat staf yang sesuai dengan bidangnya. Sumber daya yang kedua yaitu sumber daya informasi dalam pelaksanaan informasi yang diberikan kepada pencari kerja melalui sosialisasi. Selain sosialisasi pelaksana program juga menggunakan website, tetapi website tersebut jarang ada pembaruan informasi dan menggunakan media leaflet tetapi jumlah tersebut terbatas hanya untuk siswa-siswi SMK dan SMK juga yang datang ke Dinas hal ini bertujuan guna pencari kerja lebih mudah mengetahui informasi kerja. Informasi juga bisa didapat melalui kegiatan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pelaksana program. Sumber daya yang ketiga sumberdaya kewenangan, kewenangan dalam pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini di lakukan oleh Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Produktivitas. Berupa memberikan Pelatihan kerja dan Seleksi Kerja, dalam pelatihan kerja materi yang diberikan berupa pelatihan menjalankan Microsoft Word dan Microsoft Excel, selain itu pelatihan menjahit diberikan materi tentang cara menjahit baju dan celana. Seleksi yang dilakukan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja yang dicocokkan dengan peluang kerja.

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas bertanggung jawab untuk menyebarluaskan kepada pencari kerja bersama dengan pengantar kerja atau staf yang sesuai dengan bidangnya. Wewenang yang dilakukan oleh pelaksana program di rasa sudah baik dengan dilakukannya seleksi kepada pencari kerja sehingga terjadi kepatuhan pencari kerja terhadap kebijakan tersebut dan memberikan pelatihan kerja

kepada pencari kerja. Sumber daya yang ke empat yaitu peralatan, fasilitas dalam pelaksanaan program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah dirasa sudah baik, tetapi jumlah alat pelatihan kerja belum mencukupi jumlah pencari kerja yang belum memiliki bakat karena hanya memiliki 10 mesin jahit dan 10 mesin komputer saja. Gedung yang di gunakan dalam melaksanakan program tersebut juga sudah cukup memadai.

Pada variabel disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksana program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah sudah baik. Untuk insentif yang di berikan kepada pelaksana program hanyalah berupa gaji setiap bulan yang diperoleh dari Negara, insentif tambahan untuk program tersebut tidak ada. Tetapi para pelaksana program tidak putus semangat dan merasa malas karena pengangguran adalah masalah yang harus disikapi dengan serius.

Pada variabel struktur birokrasi, program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah sudah mempunyai Standar Oprasional Prosedur (SOP). Para pelaksana program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ada.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran yang terkait dengan Implemtasi Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Sosialisasi seharusnya dilakukan pada masyarakat umum agar seluruh masyarakat di Kabupaten Madiun bisa mengetahui tentang program Penemptan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah. Selama ini pelaksanaan sosialisasi hanya diberikan kepada pencari kerja yang datang ke dinas dan sekolah-sekolah SMA dan SMK saja.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak lain dalam memberikan pelatihan kerja.
3. Penambahan alat pelatihan kerja seharusnya diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja seperti teknik las.
4. Seharusnya pelaksana program melakukan inisiatif lain untuk pencari kerja yang belum bisa lolos seleksi, dengan memberikan pelatihan kepada pencari kerja untuk menjadi wira usaha baru seperti memberi pelatihan membuat kemoceng, souvenir, keset dan membuat kerajinan dari bahan bekas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal skripsi ini, penulis banyak mendapat hambatan dan tantangan. Dengan bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan tantangan dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan trimakasih kepada orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa, dosen pembimbing Ibu Hj. Weni Rosdiana, S.Sos.,M.AP yang selalu memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi, serta terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pada penulis. Beserta staf administrasi tata usaha yang telah membantu kelancaran pengurusan proses skripsi penulis hingga terselesaikan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2008. Proses Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Irfan M. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bina Akasara.
- MadiunKab.2016. Website Kabupaten Madiun, (Online). <https://madiunkab.go.id>, diakses pada 25 Desember 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No 39 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Selayang Pandang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun.

